

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan dan persampahan di Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari, dengan di dukung kinerja yang bertanggung jawab dari pekerja / tenaga harian lepas kebersihan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap pekerja / tenaga harian lepas kebersihan perlu diikuti dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian standar upah yang sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado dengan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang penetapan upah pekerja / tenaga harian lepas kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
6. Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan adalah setiap Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
7. Upah adalah Hak Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang sebagai imbalan dari pemberi kerja.
8. Kerja Tambahan / Ekstra adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk pengendalian luapan sampah dilapangan akibat aktifitas masyarakat kota meningkat pada waktu – waktu tertentu atau karena adanya luapan sampah akibat faktor alam.

BAB II
KLASIFIKASI PEKERJAAN

Pasal 2

Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari dibagi menurut kebutuhan, beban, sifat atau klasifikasi dan tanggung jawab kerja di lapangan yang terdiri dari :

1. Mekanik (Montir);
2. Operator;
3. Sopir;
4. Buruh Armada Pengangkut Sampah;
5. Petugas Pemangkas Rumput;
6. Petugas Pencabut Rumput;
7. Petugas DAS dan Pesisir Pantai;
8. Pembantu Operator;
9. Petugas Perbengkelan;
10. Petugas Pembersih TPA;
11. Petugas Pengomposan;
12. Sopir Motor Sampah;
13. Sopir Mobil Jenazah;

14. Operator Mobil Road Sweeper;
15. Pembantu Operator Mobil Road Sweeper; dan
16. Pengemudi Perahu Sampah

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah harian sesuai dengan beban kerja klasifikasi dan tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengajuan permintaan upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya pada setiap akhir bulan dan pembayarannya paling lama pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pengurusan dan penyaluran pembayaran upah para pekerja / tenaga harian lepas Kebersihan melalui Unit Kerja Dinas.

Pasal 4

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan diberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan mengikuti persyaratan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang bekerja terus - menerus minimal 6 (enam) bulan berhak mendapatkan honorarium pegawai honorer / tidak tetap bulan ke 13 (tiga belas) sebesar perhitungan upah 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Dalam pemberian upah dan pelayanan kesejahteraan bagi Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dimaksud dalam Pasal 2 bertugas selama 8 (delapan) jam kerja sehari dalam seminggu.
- (2) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, maka Pengawas dapat menunjuk tenaga pengganti untuk kelancaran pekerjaan di lapangan dan upah yang bersangkutan dibayarkan kepada penggantinya.

- (3) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan teguran / peringatan secara bertahap sampai pada penjatuhan skors.
- (4) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan kebersihan di Kota Manado.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai keberhasilan atas pelaksanaan penanganan sampah / pengelolaan kebersihan kota perlu diterapkan pengawasan tertib waktu kerja oleh aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan atau syarat secara khusus diatur dalam Perjanjian Kerja dan berpedoman pada Undang - undang / Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh setiap Pekerja/ Tenaga Harian Lepas Kebersihan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengaturan kerja ekstra guna pengendalian sampah di lapangan apabila terjadi luapan sampah pada kawasan-kawasan.
- (2) Pekerjaan ekstra pengendalian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena adanya kejadian produksi sampah luar biasa atau akibat faktor alam dan hari-hari raya / libur.
- (3) Upah kerja ekstra sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak untuk pengendalian kondisi fisik lingkungan akibat sampah, maka Kepala Dinas dapat menggunakan tenaga kerja lainnya dengan ketentuan diberikan upah sesuai standar perhitungan jam kerja.

Pasal 10

Penanganan sampah dilapangan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas didukung oleh Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Instansi teknis terkait, masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Pasal 11

Upah harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 1a Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Febuari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
da tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

Drs. RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN

NOMOR

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 9 Tahun 2018
 Tanggal : 28 Febuari 2018
 Tentang : Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

DAFTAR UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO.

No	KLASIFIKASI TENAGA KERJA	BESARNYA UPAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Mekanik (Montir)	105.000/hari	
2.	Operator	155.000/hari	
3.	Sopir	105.000/hari	
4.	Buruh Armada Pengangkut Sampah	100.000/hari	
5.	Petugas Pemangkas Rumput	100.000/hari	
6.	Petugas Pembersih DAS dan Pesisir Pantai	100.000/hari	
7.	Pembantu Operator	100.000/hari	
8.	Petugas Perbengkelan	100.000/hari	
9.	Petugas Pencabut Rumput	100.000/hari	
10.	Petugas Pembersih TPA	100.000/hari	
11.	Petugas Pengomposan	100.000/hari	
12.	Sopir Motor Sampah	2.800.000/bulan	
13.	Sopir Mobil Jenazah	2.800.000/bulan	
14.	Operator Mobil Road Sweeper	105.000/hari	
15.	Pembantu Operator Mobil Road Sweeper	100.000/hari	
16.	Pengemudi Perahu Sampah	100.000/hari	

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19730422 199303 2 004